

Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural : Inisiatif Pendidikan, Kebijakan Publik, dan Peran Media dalam Membentuk Sikap Toleransi

Abdul Hafiz*, Leli Romdaniah, Rasya Ahmad Nizar, Syifa Mauliza

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*abdul.hafiz@uinjkt.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengulas konsep dan praktik toleransi beragama dalam masyarakat plural. Fokus utama adalah menjelajahi bagaimana masyarakat yang beragam dalam hal keyakinan dan kepercayaan dapat mencapai koeksistensi yang harmonis melalui pemahaman, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan. Diskusi melibatkan studi kasus dari berbagai negara dan budaya yang sukses dalam mempromosikan toleransi beragama sebagai landasan bagi kerukunan sosial. Toleransi beragama didefinisikan sebagai sikap terbuka dan penghargaan terhadap variasi keyakinan agama tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental keadilan dan hak asasi manusia. Dalam masyarakat plural, pemahaman terhadap perbedaan keyakinan menjadi esensial untuk mengatasi konflik potensial. Artikel ini membahas inisiatif pendidikan, kebijakan publik, dan peran media dalam membentuk sikap toleransi sejak dini. Studi kasus melibatkan negara-negara yang sukses mengimplementasikan model toleransi beragama, seperti Indonesia dengan falsafah "Bhinneka Tunggal Ika", yang berarti "Berbeda-beda namun tetap satu". Pengalaman-pengalaman positif ini memberikan inspirasi bagi masyarakat di seluruh dunia untuk mengadopsi prinsip-prinsip toleransi dalam konteks keberagaman agama. Artikel ini menyimpulkan dengan menekankan pentingnya menerapkan pendekatan inklusif dalam mempromosikan toleransi beragama, yang melibatkan pendidikan yang mendalam, dialog antaragama, dan peran aktif masyarakat sipil. Pemahaman dan penerimaan terhadap pluralitas keyakinan dianggap sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan bersatu meskipun perbedaan keyakinan agama.

Kata kunci : Toleransi Agama, Masyarakat Plural, Peran Media, Kebijakan Publik dan Pendidikan, Sikap Toleransi

Abstract

This article reviews the concept and practice of religious tolerance in a plural society. The main focus is exploring how societies that are diverse in terms of beliefs and beliefs can achieve harmonious coexistence through understanding, dialogue and respect for differences. The discussion involves case studies from various countries and cultures that have been successful in promoting religious tolerance as a foundation for social harmony. Religious tolerance is defined as an open attitude and respect for variations in religious beliefs without sacrificing the fundamental values of justice and human rights. In a pluralistic society, understanding differences in beliefs is essential for resolving potential conflicts. This article discusses educational initiatives, public policy, and the role of the media in forming attitudes of tolerance from an early age. Case studies involve countries that have successfully implemented a model of religious tolerance, such as Indonesia with the philosophy of "Bhinneka Tunggal Ika", which means "Diverse but still one". These positive experiences provide

inspiration for people around the world to adopt the principles of tolerance in the context of religious diversity. The article concludes by emphasizing the importance of implementing an inclusive approach in promoting religious tolerance, involving in-depth education, interfaith dialogue, and the active role of civil society. Understanding and acceptance of a plurality of beliefs is considered the key to creating a just, peaceful and united society despite differences in religious beliefs.

Keywords: *Religious Tolerance, Plural Society, Role of Media, Public Policy and Education, Attitudes of Tolerance*

I. PENDAHULUAN

Pada era reformasi, kemajuan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai persoalan yang sumbernya berbau kemajemukan, terutama dalam bidang agama. Dalam perspektif keagamaan semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar setiap agama adalah toleransi. Akibatnya yang muncul intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energi positif membangun nilai toleransi guna mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Seharusnya pada era reformasi ini, kita menjunjung tinggi demokrasi dan toleransi. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritaristik, sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan pseudo-toleransi, yaitu toleransi yang rentan konflik-konflik komunal. Oleh sebab itu toleransi dan demokrasi harus saling terkait, baik dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil. Disamping itu nilai dasar setiap agama adalah toleransi, terutama agama Islam tidak kurang dari 300 ayat menyebutkan mutiara toleransi secara eksplisit. Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis. Permasalahannya sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin lemah, dan anti toleransi serta anti pluralisme semakin menguat. Untuk itu toleransi perlu dikembangkan dalam masyarakat plural.

Masyarakat yang multikultural dan multireligius menuntut adanya sikap toleransi sejak dini agar dapat menjalin harmoni dan kerukunan. Pendidikan, kebijakan publik, dan media memegang peran krusial dalam membentuk sikap toleransi ini. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi inisiatif pendidikan, kebijakan publik, dan peran media dalam membentuk sikap toleransi sejak dini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Toleransi beragama dalam masyarakat plural memiliki peran penting dalam memastikan kerukunan dan keberagaman di tengah perbedaan keyakinan agama. Berikut adalah beberapa aspek yang penting dalam konteks toleransi beragama dalam masyarakat plural:

1. Saling Menghormati:

Toleransi beragama membutuhkan sikap saling menghormati antara penganut berbagai agama. Ini mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap hak setiap individu atau

kelompok untuk memeluk keyakinan agama mereka sendiri.

Pengertian Terhadap Perbedaan Keyakinan:

Masyarakat plural seringkali terdiri dari individu atau kelompok dengan keyakinan agama yang beragam. Toleransi beragama melibatkan pemahaman terhadap perbedaan ini dan penolakan terhadap diskriminasi atau intoleransi atas dasar keyakinan agama.

2. Dialog Antaragama:

Mendorong dialog terbuka antar penganut berbagai agama dapat membantu membangun **pemahaman dan mengurangi ketegangan. Dialog semacam itu dapat menciptakan ruang** bagi pertukaran pemikiran dan pengalaman antar komunitas beragama.

Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Toleransi beragama terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Masyarakat harus memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan.

3. Pendidikan dan Kesadaran:

Membangun kesadaran mengenai keberagaman agama dan nilai-nilai toleransi melalui sistem pendidikan dapat membantu mengurangi ketidakpahaman dan stereotip antar kelompok agama.

4. Kerjasama Antaragama:

Masyarakat plural dapat memperkuat toleransi dengan mendorong kerjasama antaragama dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ini dapat membantu mengurangi polarisasi dan membangun hubungan positif antar kelompok agama.

Toleransi beragama bukan hanya tentang menghormati perbedaan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana semua individu merasa aman untuk mempraktikkan keyakinan agama mereka tanpa takut atau diskriminasi. Dengan membangun kesadaran, dialog, dan kerjasama antaragama, masyarakat dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk hidup bersama dalam keberagaman.

Di era reformasi ini, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berbau kemajemukan, khususnya bidang agama. Agama jangan diisolasi dari persoalan public. Sekarang orang miskin makin banyak, namun yang naik haji juga banyak. Ini karena agama kurang dikontekstualisasikan dan dijadikan solusi atas berbagai masalah social, jadi kurang adanya pembahasan tentang tanggung jawab sosial umat beragama. Kini mulai terjadi kemunduran atas rasa dan semangat kebersamaan yang sudah dibangun selama ini. Intoleransi semakin menebal ditandai dengan meningkatnya rasa benci dan saling curiga diantara sesama anak bangsa. Hegemoni mayoritas atas minoritas semakin menebal, mengganti kasih saying, tenggang rasa, dan semangat berbagi. Intoleransi muncul akibat hilangnya komitmen untuk menjadikan toleransi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang membuat bangsa

terpuruk.

Dalam perspektif keagamaan, semua kelompok agama belum yakin bahwa nilai dasar dari setiap agama adalah toleransi. Akibatnya, yang muncul adalah intoleransi dan konflik. Padahal agama bisa menjadi energy positif untuk membangun nilai toleransi guna mewujudkan Negara yang adil dan sejahtera (Wahyudi, 2008). Zuhairi (2008) mengatakan persoalan anti toleransi dan anti pluralism yang semakin menguat tidak hanya dipengaruhi oleh iman dan kitab suci, tetapi banyak dipengaruhi oleh faktor riil, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pluralisme tidak berarti pernyataan bahwa semua agama sama, juga tidak berkaitan dengan pertanyaan mana yang benar dan baik. Namun, pluralism adalah kesediaan menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup, berbudaya, dan berkeyakinan agama yang berbeda. Dalam penerimaan itu, orang bersedia untuk hidup, bergaul, dan kerjasama membangun negara.

Frans Magnis Suseno (2008) mengatakan pluralisme adalah syarat mutlak agar bangsa Indonesia yang begitu plural dapat bersatu dan berbangsa yang tidak menghargai pluralisme adalah bangsa yang membunuh dirinya sendiri. Sujatmiko (2008) mengutip hasil survei yang dilakukan oleh Roy Morgan tahun 2006 terhadap 25.000 responden yang dimuat pada The Jakarta Post tanggal 14 November 2006 menunjukkan bahwa 89 persen penduduk Indonesia menganggap dirinya lebih sebagai bangsa Indonesia ketimbang sebagai suku mereka. Dalam menghadapi tantangan global perlu adanya kecakapan berkompetisi, berjejaring (*networking*), dan kerja keras (*hardworking*) yang dapat didukung oleh nilai-nilai keagamaan. Hal ini diharapkan menumbuhkan semangat dan optimism yang dapat meningkatkan kualitas hidup bangsa secara menyeluruh. Beberapa cuplikan yang telah dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa rasa kebangsaan telah berkembang, sebaliknya rasa kebersamaan semakin pudar, menguatnya ikatan primordial dan anti toleransi. Maka toleransi perlu dibina dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat plural/majemuk.

Alangkah indahnya jika keragaman suku, agama, ras, dan antara golongan yang biasa disingkat dengan "SARA" dapat dijadikan modal bersama untuk membangun Indonesia. Semua elemen bangsa ditempatkan sebagai kekayaan sosial yang berharga diperlakukan adil, serta punya kesempatan berkembang dan berperan membangun negeri. Namun pada kenyataan kerusuhan yang sering terjadi di Indonesia berlatar belakang SARA, sehingga kemajemukan bukan dijadikan modal dasar pembangunan Indonesia, tetapi seolah-olah menjadi beban. Hal ini mencerminkan bahwa bangsa kita sedang mengalami disorientasi nilai solidaritas menyangkut kepedulian sosial dan penghargaan atas potensi individu dan kelompok lain. Tidak ada lagi nilai kebersamaan yang mengikat kehidupan bersama. Padahal tanpa nilai itu, masyarakat rentan menjadi kumpulan kami-kami yang miskin semangat kekitaan. Dibyorini (2005:158-162) mengutip pendapat Nasikun, Nort, Geertz, dan Magnis Nasikun mengatakan masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang unik.

Secara horizontal masyarakat Indonesia ditandai dengan kenyataan adanya perbedaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Kemudian Magnis Suseno menyatakan jika seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat menghayati kebudayaan lokalnya secara sempit dan seluruh identitasnya berdasarkan kelompok kecilnya sendiri, maka hal ini dapat menjadi suatu ancaman bagi integrasi nasional. Demikian juga bila agama tidak terintegrasi kedalam kebudayaan bangsa seluruhnya, bila agama mengisolasi diri dan merasa tidak terlibat secara positif dalam kebudayaannya, maka masyarakat akan terpecah belah menjadi kelompok-kelompok dengan ikatan-ikatan primordial yang semakin menguat.

Untuk membangun solidaritas sosial antara masyarakat, Nasikun mengatakan paling tidak ada dua pendekatan atau perspektif yang dapat digunakan, yaitu perspektif sistem sosial dan sistem budaya. Perspektif sistem sosial, yaitu melalui *inter-group relation*, yang dimaksud sebagai hubungan anggota-anggota dari berbagai kelompok. Makin intensif hubungan antar kelompok makin tinggi tingkat integrasi diantara mereka. Dengan adanya *inter-group relation* ini dapat pula menetralkan konflik-konflik diantara kelompok, karena setiap anggota kelompok tidak akan memiliki loyalitas tunggal dalam suatu kelompok tertentu, namun sebaliknya loyalitas mereka ganda berdasarkan kelompok-kelompok yang mereka masuki. Dengan demikian kekhawatiran akan terjadi fanatisme sempit, sentiment- sentiment primordial juga akan dapat dinetralkan karena kegunaan loyalitas yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok. Perspektif sistem budaya dikatakan, bahwa masyarakat majemuk dapat bersatu melalui penganutan nilai-nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, akan semakin kuat pula perekat bagi mereka. Nilai-nilai umum itu bersumber pada budaya dominan masyarakat multi etnik yang menjadi acuan perilaku yang terpola. Yang penting dalam kehidupan pada masyarakat majemuk adanya pengakuan dan penerimaan akan perbedaan. Dengan adanya pengakuan dan penerimaan justru berdampak positif bagi kehidupan keagamaan kita. Oleh sebab itu, demokrasi dan toleransi harus terkait dalam komunitas masyarakat politik maupun masyarakat sipil (Misrawi, 2008). Sehubungan dengan kedua hal tersebut, dipandang penting adanya toleransi dalam kehidupan masyarakat plural yang demokratis.

PENGERTIAN TOLERANSI

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan (Soekanto, 1982:71). Dari sejarah dikenal bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran yang sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan-perselisihan. Halim (2008) dalam artikel yang berjudul "Menggali Oase Toleransi", menyatakan "Toleransi berasal dari bahasa latin, yaitu *tolerantia*, berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran". Secara

umum istilah ini mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela, dan kelembutan. *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengartikan toleransi sebagai sikap “saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai ditengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia”. Untuk itu toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berfikir dan beragama. Singkatnya toleransi setara dengan sikap positif dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia. Ada dua model toleransi, yaitu : **Pertama**, toleransi pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. **Kedua**, toleransi aktif, melibatkan diri dengan yang lain ditengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai diantara keragaman. Di Indonesia, praktek toleransi mengalami pasang surut. Pasang surut ini dipicu oleh pemahaman *distingtif* yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”. Tak pelak, dalam berbagai kontemporer, sering dikemukakan bahwa, radikalisme, ekstremisme, dan fundamentalisme merupakan baju kekerasan yang ditimbulkan oleh pola pemahaman yang eksklusif dan antialog atas teks-teks keagamaan. Seluruh agama harus bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Hal ini tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan teologi eksklusif yang hanya berhenti pada klaim kebenaran, tetapi membutuhkan teologi pluralisme yang berorientasi pada pembebasan. Toleransi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah: sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima ditengah keragaman budaya, suku, agama dan kebebasan berekspresi. Dengan adanya sikap toleransi, warga suatu komunitas dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dilingkungannya.

I. PENGERTIAN MASYARAKAT PLURAL

Kita perlu menyelamatkan bangsa dan negara dengan kembali kepada nilai-nilai luhur yang pasti melekat pada sebagian besar orang, kelompok, dan masyarakat di negeri ini. Persoalannya tidak setiap orang atau kelompok yang mau mengakui pluralisme dan multikulturalisme. Padahal dengan saling mengenal, kelompok masyarakat yang plural dapat mengembangkan apresiasi, penghormatan, bahkan kerjasama antara yang satu dengan yang lain (A'la, 2008). Subkhan (2007:29) menyatakan pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun, yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat dijumpai dimana-mana. Didalam masyarakat tertentu, dikantor tempat kita bekerja, di sekolah tempat kita belajar, bahkan di pasar tempat kita berbelanja. Tapi seseorang baru dapat dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan

persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan. Intan (2007) menyatakan pluralisme agama yang berpondasikan solidaritas individual niscaya membuahkan beberapa implikasi positif:

Pertama, Pemahaman kemajemukan agama bukan lagi sekedar “kenyataan”, melainkan menjadi “keharusan” yang tidak dapat dihilangkan. Pada realitas ini muncul usaha saling memperhatikan yang lahir dari kesadaran interdependensi. Pada kondisi ini, agama didorong memberi kontribusi karena interdependensi agama mensyaratkan ketidakaktifan satu agama akan berpengaruh kepada hasil-hasil yang akan dicapai. Jika kesadaran interdependensi agama terus bertumbuh, partisipasi agama-agama dapat dimaksimalkan.

Kedua, pluralisme agama berbasis solidaritas intelektual menjunjung prinsip *take and give*. Dialog yang baik akan menghasilkan perubahan kedua belah pihak.

Ketiga, berdasarkan solidaritas intelektual, pluralisme agama mengharuskan kebebasan beragama bukan sebatas negatif *immunity*, bahwa agama harus bebas dari cengkaman sosial-politik termasuk negara.

Keempat, Pluralisme agama dengan solidaritas intelektual berpotensi menghasilkan nilai-nilai yang mengandung *common good*. Yang dimaksudkan dengan masyarakat plural dalam tulisan ini, adalah masyarakat majemuk yang ditandai adanya beragam suku bangsa, agama, budaya atau adat istiadat. Kondisi masyarakat yang demikian diperlukan kerjasama dengan sikap toleransi dalam menghadapi berbagai tantangan untuk memperkuat ketahanan sosial suatu komunitas. Pada masyarakat majemuk atau plural, secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, dan perbedaan kedaerahan, dan sebagainya. Sedangkan ditinjau secara vertical ternyata adanya perbedaan yang mencolok antara lapisan atas dengan lapisan bawah. Kondisi masyarakat yang demikian akan mudah munculnya berbagai kerusuhan berupa konflik antar etnis, konflik atas nama agama, dan adanya kecemburuan sosial yang disebabkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara golongan kaya dan miskin. Apabila suatu masyarakat atau komunitas tidak mampu mencegah atau mengelola konflik dan kekerasan serta tidak mampu melindungi warga masyarakatnya yang rentan, hal ini mencerminkan lemahnya ketahanan sosial masyarakat tersebut. Solusi yang ditawarkan, yaitu dengan pendekatan **toleransi**. Sebagai nilai kebijakan dalam kehidupan bersama. Misrawi (2008) mengutip pendapat Rainer Forst dalam *Tolerance and Democracies* (2007) menyebutkan, ada dua cara pandang tentang toleransi yaitu konsep yang dilandasi pada otoritas negara (*permission conception*) dan konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain (*respect conception*).

Dalam hal ini, Forst lebih memilih konsep kedua, yaitu toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai ditengah keragaman suku, agama, ras, dan bahasa. Untuk membangun toleransi sebagai nilai kebijakan setidaknya ada dua modal yang dibutuhkan yaitu:

Pertama, toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif.

Kedua, membangun kepercayaan diantara berbagai kelompok dan aliran. Prinsip dasar semua agama adalah toleransi, karena semua agama pada dasarnya mencintai perdamaian dan anti kekerasan. Christopher (2005).

Pada masyarakat majemuk atau plural, secara horizontal ditandai dengan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, dan perbedaan kedaerahan, dan sebagainya. Solusi yang ditawarkan, yaitu dengan pendekatan **toleransi** sebagai nilai kebijakan dalam kehidupan bersama.

Toleransi beragama dalam masyarakat plural memiliki peran penting dalam memastikan kerukunan dan keberagaman di tengah perbedaan keyakinan agama. Berikut adalah beberapa aspek yang penting dalam konteks toleransi beragama dalam masyarakat plural:

1. Saling Menghormati:

Toleransi beragama membutuhkan sikap saling menghormati antara penganut berbagai agama. Ini mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap hak setiap individu atau kelompok untuk memeluk keyakinan agama mereka sendiri.

2. Pengertian Terhadap Perbedaan Keyakinan:

Masyarakat plural seringkali terdiri dari individu atau kelompok dengan keyakinan agama yang beragam. Toleransi beragama melibatkan pemahaman terhadap perbedaan ini dan penolakan terhadap diskriminasi atau intoleransi atas dasar keyakinan agama.

3. Dialog Antaragama:

Mendorong dialog terbuka antar penganut berbagai agama dapat membantu membangun pemahaman dan mengurangi ketegangan. Dialog semacam itu dapat menciptakan ruang bagi pertukaran pemikiran dan pengalaman antar komunitas beragama.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia:

Toleransi beragama terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Masyarakat harus memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan.

5. Pendidikan dan Kesadaran:

Membangun kesadaran mengenai keberagaman agama dan nilai-nilai toleransi melalui sistem pendidikan dapat membantu mengurangi ketidakpahaman dan stereotip antar kelompok agama.

6. Kerjasama Antaragama:

Masyarakat plural dapat memperkuat toleransi dengan mendorong kerjasama

antaragama dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ini dapat membantu mengurangi polarisasi dan membangun hubungan positif antar kelompok agama.

Toleransi beragama bukan hanya tentang menghormati perbedaan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana semua individu merasa aman untuk mempraktikkan keyakinan agama mereka tanpa takut atau diskriminasi. Dengan membangun kesadaran, dialog, dan kerjasama antaragama, masyarakat dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk hidup bersama dalam keberagaman.

Inisiatif Pendidikan untuk Membentuk Sikap Toleransi

Pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk karakter anak-anak sejak dini. Program pendidikan yang inklusif dan multikultural mendorong pemahaman tentang perbedaan keyakinan dan memberikan ruang bagi dialog antaragama. Sekolah dan kampus dapat menjadi lingkungan yang mendukung dalam menciptakan generasi yang menghargai keberagaman.

Kebijakan Publik dalam Mendorong Sikap Toleransi

Kebijakan publik yang mendukung toleransi beragama mencakup perlindungan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan perlakuan yang setara bagi semua warga negara. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam hukum dan kebijakan memberikan landasan yang kuat untuk masyarakat yang inklusif dan adil.

Peran Media dalam Membentuk Sikap Toleransi

Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini dan sikap masyarakat. Melalui program-program pendidikan di media, seperti dokumenter dan acara anak-anak yang mendidik, dapat membantu menghilangkan stereotip dan membuka wawasan tentang beragam keyakinan. Pemberitaan yang objektif dan bertanggung jawab juga dapat mencegah penyebaran prasangka.

Studi Kasus: Keberhasilan Inisiatif di Beberapa Negara

Makalah ini akan mengeksplorasi studi kasus dari beberapa negara yang telah berhasil menerapkan inisiatif pendidikan, kebijakan publik, dan media dalam membentuk sikap toleransi sejak dini. Contohnya termasuk program pendidikan multikultural di Swedia, kebijakan inklusif di Kanada, dan peran media dalam mendukung kerukunan di Malaysia.

Tantangan dan Solusi

Meskipun ada banyak inisiatif positif, masih ada tantangan, seperti resistensi terhadap perubahan dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Solusi melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan media untuk mengatasi hambatan-hambatan ini.

IV. KESIMPULAN

Mencermati uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di era reformasi kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berbau kemajemukan, khususnya bidang agama. Agama yang seharusnya menjadi solusi atas berbagai masalah sosial, justru memicu timbulnya permasalahan sosial. Hal ini disebabkan kurang adanya pembahasan tentang tanggung jawab sosial umat beragama.
2. Kini semangat kebersamaan semakin menurun, dan toleransi semakin menebal ditandai dengan meningkatnya rasa benci dan saling curiga diantara anak bangsa. Hal ini disebabkan semua kelompok agama belum yakin bahwa inti dasar setiap agama adalah toleransi – perdamaian – anti kekerasan.
3. Untuk mencegah dan menanggulangi berbagai permasalahan sosial, perlu dibangun dan dikembangkan toleransi dalam kehidupan pada masyarakat majemuk.
4. Dengan berkembangnya toleransi, maka terjalinnya hubungan antar anggot-anggota dari berbagai kelompok, hal ini dapat menetralsir terjadinya konflik-konflik sosial dan tidak khawatir akan terjadi fanatisme sempit serta sentiment-sentimen yang bersifat primordial. Disamping itu, interaksi yang dilakukan dalam kehidupan bersama mengacu kepada nilai- nilai umum yang dijunjung oleh semua warga masyarakat plural/majemuk.
5. Inisiatif pendidikan, kebijakan publik, dan peran media memiliki peran krusial dalam membentuk sikap toleransi sejak dini. Dengan membangun dasar toleransi di masa kanak-kanak, masyarakat dapat berkembang sebagai warga yang menghargai keberagaman agama dan melibatkan diri dalam membangun dunia yang lebih damai dan inklusif.

V. DAFTAR PUSTAKA

- A'la, abd. 2008. "Kebebasan Anarkis", Kompas 3 juni.
- Christoper, Daniel L.Smith (editor). 2005. Lebih Tajam dari Pedang-Refleksi Agama-agama Tentang Paradoks Kekerasan, Yogyakarta : Kansius.
- Dibyorini, MC.Candra Rusmala. 2005. "Solidaritas Sosial dalam kemajemukan Masyarakat Indonesia", Artikel dalam jurnal Ilmu Sosial Alternatif, Volume VI, Nomor 12, Desember 2005, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
- Halim, Abdul. 2008. "Menggali Oase Toleransi", Kompas 14 April.
- Hasyim, Syafiq. 2007. "Idul Fitri, Memahami Hikmah Berbeda". Kompas 20 Oktober.
- Hernowo, M. 2008. "Kemajemukan Agama Bisa Menjadi Potensi", Kompas 9

- Februari. Intan, Benyamin F. 2007. "Solidaritas Intelektual", Kompas 21 September.
- Khoiri, Ilham. 2007. "Mimpi Indah Merajut Kebangsaan", Kompas 16 Agustus. Kompas.
2008. "Antitoleransi Yang Menguat Harus Segera Dihilangkan", 31 Maret
- Misrawi, Zuhairi. 2008. "Toleransi Sebagai Kuasa Nilai", Kompas 24 Mei.
- Hanifah, Abu. 2007. Toleransi Dalam Masyarakat Plural Memperkuat Pertahanan Sosial. Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: CV. Rajawali.
- Subkhan, Imam. 2007. Hiruk Pikuk Wacana Pluralisme di Yogya, Yogyakarta : Kansius.
- Sujatmiko, Iwan Gardono. 2008. "Makna Satu Abad Budi Utomo", Kompas 16 Mei.
- Suseno, Frans Magnis. 2008. "Junjung Tinggi Pluralitas": Pengerasan Identitas Kelompok Akan Membunuh Diri Sendiri, Kompas 12 Mei.
- Sztomka, Piotr. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial, Dialihbasakan oleh Alimandan, dan Diedit oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: Prenada.
- Wahyudi, M.Zaid. 2008. "Jadikan Toleransi Sebagai Modal", Kompas 17 Mei.